

The Natives Learned How To Live Healthy: European Waste Management In Semarang (1916-1930)

Silvi Nihlatin Naila^{a*}, Nina Witasari^b

^{ab}Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

*sn.naila@students.unnes.ac.id

Abstract

Entering the 20th century, modernization became the central theme in the Dutch East Indies, especially in the cities where most Europeans lived. Semarang, as a municipality, is also trying to modernize; the government's main focus is to introduce a clean lifestyle and protect the European-style environment. The European view is used as the standard of cleanliness in Semarang, even though the native people have their own way of handling waste, such as community service work every week. In contrast, Europeans are used to a particular waste management team formed by the government. This research will explain how the waste management service was formed in Semarang and the government's efforts to educate the native community. This research uses historical research methods, namely heuristics (source collection), criticism (verification of sources obtained), interpretation (interpretation), and historiography (writing). The results show that the modernization promoted by the government cannot be separated from the proposal of several Europeans to bring the native community along in the process. Therefore, a waste management service and educational curriculum were formed. However, the success of government intervention to change lifestyles has not been completely successful because in the end many people still throw rubbish carelessly.

Keywords: Waste, Semarang, hygienic, management

Bumiputra Belajar Buang Sampah: Sampah dalam Pengelolaan Eropa di Kota Semarang (1916-1930)

Abstrak

Memasuki abad ke-20, modernisasi menjadi tema utama di Hindia Belanda, khususnya di kota-kota yang menjadi tempat tinggal sebagian besar orang Eropa. Semarang sebagai kotapraja juga berusaha dimodernisasi, fokus utama pemerintah adalah memperkenalkan pola hidup bersih dan menjaga lingkungan ala Eropa. Pandangan Eropa dijadikan standar kebersihan di Semarang, padahal masyarakat bumiputra memiliki caranya sendiri dalam menangani sampah, seperti kerja bakti setiap minggu, sementara orang Eropa terbiasa dengan tim khusus pengelola sampah yang dibentuk pemerintah. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana dinas pengelola sampah terbentuk di Semarang serta upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat bumiputra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis, yakni: heuristik (pengumpulan sumber); kritik (verifikasi terhadap sumber yang diperoleh); interpretasi (penafsiran); dan historiografi (penulisan). Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa modernisasi yang digalakkan pemerintah tidak lepas dari usulan beberapa orang Eropa untuk membawa serta masyarakat bumiputra berproses, karenanya dinas pengelola sampah dan kurikulum pendidikan dibentuk. Meski demikian, keberhasilan intervensi pemerintah untuk mengubah gaya hidup belum sepenuhnya berhasil sebab masyarakat pada akhirnya masih banyak yang membuang sampah sembarangan.

Kata Kunci : Sampah, Semarang, higienis, pengelolaan

Pendahuluan

Pada awal abad ke-20, beberapa daerah di Hindia Belanda diberi hak otonomi atau hak untuk mengelola daerahnya sendiri. Semarang yang saat itu menjadi ibukota karesidenan termasuk kota yang mendapat kesempatan tersebut, kota ini ditetapkan sebagai *gemeente* atau kotapraja sejak 1 April 1906 (Staatsblad No. 46 tahun 1907, (Gemeente Semarang, 1931). Semarang ditetapkan sebagai kotapraja bukan tanpa alasan, kota ini menempati urutan ketiga jumlah penduduk terpadat setelah Batavia dan Surabaya. Di Semarang juga terdapat pelabuhan dan jawatan kereta api, orang-orang Eropa yang tinggal di dalamnya juga terhitung lumayan dibanding beberapa daerah lain, bahkan residen tinggal di kota ini. Singkatnya Semarang adalah kota penting di abad ke-20, sebuah kota pelabuhan dan industri yang sedang berkembang (Tim Departemen Sejarah Universitas Diponegoro et al., 2020).

Hal pertama yang dilakukan setelah pelantikan Semarang menjadi kotapraja adalah pembentukan pemerintahan atau Dewan Kota (*gemeenteraad*). Kota yang baru belajar berpolitik ini tidak kehabisan orang-orang cerdas dan kritis di bidangnya, karena banyak orang Eropa dengan kualifikasi tersebut tinggal di Semarang sambil menyebarkan ideologinya, hal ini bisa dilihat dari banyaknya surat kabar yang memuat tulisan-tulisan provokatif para pemikir yang ada di Semarang (Budiman 2021). Salah satu bidang yang disoroti oleh orang-orang ini adalah kotornya lingkungan Kota Semarang, khususnya lingkungan bumiputra yang terlihat kumuh, dengan rumah terbuat dari anyaman bambu, tanpa sekat antara satu rumah dengan lainnya, dan jarang yang berventilasi (Liem, 2004; Tillema, 1916). Kritik dari Tillema, seorang apoteker yang peduli pada lingkungan Kota Semarang, menyadarkan pemerintah, bahwa Semarang perlu kontribusi dari berbagai pihak apabila ingin menjadi kota modern. Kesadaran ini diyakini pemerintah sebagai peningkatan moral, bagi orang-orang Eropa kota modern adalah kota yang memiliki moral dengan menjaga lingkungannya sendiri (Gemeente Semarang 1931; *Verslag van de Toestand over der Gemeente Semarang 1916*).

Standar Eropa dalam menjaga lingkungannya adalah membuang sampah pada tempat yang disediakan, mengumpulkannya lalu membawanya ke tempat yang jauh dari tempat tinggal penduduk. Sistem seperti ini sudah dikenal di benua Eropa sejak lama, tapi baru terkenal menjelang awal abad ke-20. Sistemnya kemudian dipelajari dan diadaptasi di Kota Semarang dengan sedikit perubahan (Wegenraad & Koreman, 1927). Masalah yang paling utama bukan hanya cara menerapkan sistem tersebut, tapi juga perbedaan latar belakang dan gaya hidup 89.266 jiwa yang bertempat di Semarang, yang menyebabkan bentrokan sosial, terutama antara orang-orang Eropa dan bumiputra (Budiman, 2021). Masyarakat Eropa yang terbiasa hidup secara individual dan dilayani oleh pemerintah bersinggungan hidup dengan masyarakat bumiputra yang biasanya hidup berkelompok dan bergotong royong satu sama lain, contohnya seperti kerja bakti yang diadakan setiap minggu untuk membersihkan kampung mereka. Orang-orang Eropa tidak memiliki kebiasaan tersebut, setiap hari ada petugas dari pemerintah atau swasta yang bertugas mengambil sampah dari rumah-rumah mereka di Eropa. Cara Eropa memandang sampah bukan sekadar barang tidak berguna, melainkan harus disingkirkan karena dapat menimbulkan penyakit. Hal ini disebabkan menurut pandangan masyarakat Eropa kebersihan adalah salah satu faktor penghambat penyakit. Jika lingkungan bersih, maka kesehatan juga akan terjaga (Wijono, 2005). Di sini masyarakat kelas tiga dipaksa untuk ikut standar pemerintah atau cara Eropa dalam mengelola sampah.

Cara Eropa yaitu memiliki badan sendiri yang bertugas untuk mengelola sampah. Badan yang bertugas biasanya disebut *reinigingsdienst* atau Dinas Kebersihan (Wegenraad & Koreman, 1927). Sistem kerja Dinas Kebersihan mulai dicoba sejak tahun 1914 di Semarang dengan objek awal adalah lingkungan Eropa, saat itu namanya masih Divisi Kebersihan. Di tahun 1915, lingkungan bumiputra mulai diikutsertakan dalam tugas-tugas Divisi Kebersihan. Setelah dua tahun berjalan, respon positif yang didapat pemerintah dari warga (khususnya warga kelas satu) membuat pemerintah mempertimbangkan untuk mengembangkan divisi ini menjadi lebih terstruktur dan terarah (*Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1916*). Akhirnya rencana pembentukan Dinas Kebersihan mulai dicetuskan di tahun 1916, dengan beberapa konsep dasar yang menjiplak sistem kebersihan di Eropa namun dengan penyesuaian kondisi lingkungan Kota Semarang (Wegenraad & Koreman, 1927).

Tugas Dinas Kebersihan bukan hanya mengelola sampah, tapi juga mengedukasi masyarakat bumiputra tentang sampah dan hidup bersih supaya selaras dengan pemikiran pemerintah. Masa jaya Dinas Kebersihan berlangsung dari tahun 1916, dimana sistem kerjanya mulai dicanangkan, hingga tahun 1930 dimana

kinerjanya sempat ambruk karena *great depression* atau krisis malaise. Artikel ini membahas mengenai sistem kerja Dinas Kebersihan dalam mengelola sampah di Kota Semarang selama tahun 1906-1930.

Metode

Penelitian ini cenderung ke lingkup sejarah lingkungan karena membahas tentang sampah yang erat kaitannya dengan isu-isu lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian historis, yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Daliman, 2018; Notosusanto, 1964). Sumber-sumber yang dikumpulkan selama penelitian ini berasal dari beberapa domain internet pemerintahan Belanda, seperti *delpher.nl*, *colonialarchitecture.eu*, *nationaalarchief.nl*, yang menyediakan arsip-arsip pemerintahan seperti *Verslag van de Toestand over der Semarang Gemeente* dari tahun 1914-1930. Ada juga buku-buku sezaman seperti *Kromoblanda* dan *Gedenkboek der Gemeente Semarang (1906-1931)*, dan koran-koran pada masa itu, yaitu *De Locomotief* dan *Het Nieuws*. Beberapa sumber pendukung seperti buku-buku yang membahas hal tentang pengelolaan sampah, atau membahas tentang Semarang didapatkan dari Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan koleksi pribadi.

Proses berikutnya adalah kritik sumber (Langlois & Seignobos, 2015). Kritik sumber dilakukan untuk validasi data, apakah data tersebut asli atau salinan, sezaman atau tidak. Data-data yang didapatkan dari domain pemerintah Belanda tidak diragukan keasliannya meskipun disajikan dalam bentuk digital atau salinan dari sumber asli. Sumber-sumber tersebut juga dikeluarkan pada tahun-tahun 1914-1930, dilihat dari bukti penerbitannya. Langkah selanjutnya adalah interpretasi (Kuntowijoyo, 2005). Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis teks terhadap data-data tertulis mengenai Semarang. Terakhir, historiografi atau penulisan (Daliman, 2018). Penulisan merupakan tahap terpenting dalam penelitian sejarah. Tulisan menggambarkan pemahaman penulis atas data-data yang telah didapatkan.

Hasil dan Pembahasan

Perbedaan Konsep Hidup Bersih antara Bumiputra dan Eropa

Sebagian besar orang bumiputra yang tinggal di Semarang berasal dari suku Jawa, salah satu suku terbesar yang telah ada sejak jaman dulu. Orang Jawa merupakan orang yang sangat mengkhayati kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang Jawa dihitung dengan perhitungan yang sulit dipahami orang-orang Eropa (Ashadi, 2017). Apa yang dilakukan, dikenakan, atau didirikan dalam budaya Jawa memiliki falsafahnya sendiri, ini karena orang-orang Jawa sangat mencintai alam dan berterimakasih pada yang memberikan kehidupan, namun cara budaya Jawa menghormati alam dan menjaganya bukan dari segi fisik, melainkan dari segi batin atau sikapnya dalam memandang kehidupan (Geertz, 2013). Orang-orang Jawa cenderung memiliki sikap yang sopan terutama pada penguasa atau orang yang lebih tua, menerima segala keadaan dengan lapang dada, dan berusaha untuk tidak berbuat jahat atau neko-neko. Hal ini diyakini tidak akan membuat Sang Pencipta Kehidupan marah sehingga tidak akan terjadi kerusakan atau musibah berkepanjangan (Moertono, 2017).

Masyarakat Jawa yang dalam hal ini adalah orang-orang bumiputra juga senang bergotong royong, kerja bakti membersihkan desa setiap beberapa waktu sekali, bahkan tak segan membersihkan halaman rumah pejabat bumiputra yang kotor (Nieuwenhuys 2019). Orang-orang bumiputra juga sangat terikat dengan sungai, karena dari sungai semua kebutuhan terpenuhi. Mandi, buang air, mencuci, dan minuman dapat didapatkan dari sungai, bahkan sampah pun seringkali dibuang ke sungai karena diyakini sampah-sampah itu akan terurai sendirinya (Geertz, 2013).

Keseluruhan konsep tersebut sangat berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Eropa. Pandangan orang Eropa terhadap lingkungan tidak sedalam masyarakat Jawa/bumiputra yang dapat menghubungkan semuanya dengan ketenangan jiwa. Orang Eropa hanya tahu bahwa lingkungan yang sehat dapat membuat tubuh juga sehat. Sungai yang dilihat orang Eropa hanyalah penghasil air, yang bisa diminum setelah dimasak atau disterilkan (Van Niel, 2009). Kebiasaan bumiputra yang menjadikan sungai sebagai tempat untuk banyak aktivitas dianggap sangat tidak sehat dan mencemari lingkungan, belum lagi sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Konsep gotong royong dalam membersihkan kampung juga tidak dikenal

orang Eropa karena sebagian besar orang-orang Eropa cukup individualis, menyerahkan sebagian besar pekerjaan lingkungan terhadap pemerintah (Wegenraad & Koreman, 1927). Perbedaan cara pandang ini menyebabkan gesekan, belum lagi mitos bumiputra malas yang membuat pemerintah Eropa meyakini bahwa untuk mengubah kebiasaan masyarakat bumiputra dibutuhkan paksaan, intervensi dari pemerintah supaya masyarakat bumiputra mengikuti cara pandang Eropa dalam memperlakukan lingkungan (Alatas, 1989). Dalam hal ini, tugas tersebut diserahkan kepada Dinas Kebersihan yang mulai dibentuk tahun 1916 (*Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1916*).

Para Pembaharu dari Eropa

Sebagian orang Eropa memang menganggap masyarakat bumiputra jorok, tidak tertata, dan terlalu pasrah dengan keadaan. Hal ini didasarkan pada perbedaan budaya yang sangat besar antara orang Eropa dengan bumiputra. Kota-kota di Eropa sejak mula telah dirancang dengan konkret sebelum benar-benar dibangun sehingga ketika pembangunan kota selesai, semuanya benar-benar tertata, baik dari jalanan, letak bangunan, maupun taman-taman, membuat setiap warganya terbiasa akan keindahan dan keteraturan kota yang ditempati (Basundoro, 2020).

Berbeda dengan di Eropa, kota-kota di Hindia Belanda, khususnya di Jawa dibangun berdasarkan perhitungan arah mata angin, weton, dan kepercayaan Jawa lainnya, hampir setiap detail bangunan di Jawa memiliki falsafahnya sendiri (Basundoro, 2020). Jika merujuk pada beberapa tulisan, kota-kota di Jawa tidak melulu mengenai bangunan atau kerajaan, melainkan lebih kepada hadirnya seorang raja (Moertono, 2017). Sehingga di mana seorang raja tinggal, maka di tempat tersebut disebut sebagai pusat kerajaan. Masyarakat Eropa tidak terbiasa dengan konsep tersebut, belum lagi banyak lingkungan dan tempat tinggal orang bumiputra yang kumuh dan jauh dari kesan lingkungan sehat. Orang-orang Eropa yang datang ke Jawa berusaha membangun kota-kota di Jawa sesuai dengan preferensi kota mereka di Eropa, khususnya di Belanda. Hal ini dilakukan selain untuk mengobati rasa rindu pada kampung halaman, juga sebagai cara untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan asri (Basundoro, 2020).

Salah satu perancang kota di Hindia Belanda yang cukup terkenal pada masa tersebut adalah Herman Thomas Karsten. Karsten berhasil merancang beberapa bangunan di Kota Semarang dan kota-kota lain seperti Stasiun Poncol dan Pasar Jouhar (*Gemeente Semarang, 1931*). Sebagai seorang arsitek, Thomas Karsten berprinsip bahwa membangun kota bukan sekadar merancang dan mendirikan bangunan yang mewah, tetapi harus membawa serta jiwa kota tersebut ke dalam rancangan yang disusun, sebab bangunan-bangunan yang menjadi ikon sebuah kota merepresentasikan jiwa kota tersebut (Cote, 2011). Thomas Karsten yang berjiwa humanis berhasil mengamati dan menyatukan 3 unsur utama penghuni kota-kota di Jawa, yakni Eropa dengan bentengnya, Tionghoa dengan rukonya, dan Jawa dengan kampungnya (Cote, 2011).

Thomas yang juga bergabung dengan Vereeniging van Locale Brengen (Asosiasi Kepentingan Lokal), sebuah organisasi sosial politik yang usulannya cukup sering diterima pemerintah, mengamati bahwasanya masyarakat bumiputra butuh lingkungan yang lebih sehat. Karenanya, ia mengusulkan pada pemerintah untuk membangun perkampungan khusus masyarakat bumiputra yang jauh lebih bersih, sehat, dan tertata, dibangun sesuai syarat-syarat rumah yang baik, yakni luas, memiliki ventilasi, dan memiliki kamar mandi (Cote, 2011).

Keinginan Thomas Karsten ini selaras dengan Hendrik Freek Tillema, seorang apoteker dan pengusaha yang tinggal di Semarang. Latar belakangnya sebagai seseorang yang bekerja di bidang kesehatan mendorong Tillema untuk lebih peka terhadap kebiasaan dan gaya hidup orang-orang di sekitarnya. Tillema menyadari bahwa gaya hidup masyarakat bumiputra sangat berbeda jauh dengan orang-orang Eropa, belum lagi lingkungan tempat tinggalnya yang tidak bisa dibilang layak. Keprihatinan Tillema mendorongnya untuk melakukan penelitian secara langsung ke kampung-kampung dan menuliskan hasil temuannya tersebut ke dalam buku (Tillema, 1916).

Perjalanan Tillema menyusuri kampung-kampung di Jawa, khususnya di Semarang membuat keprihatinannya meningkat sehingga ia memberikan usulan pada pemerintah untuk mengajarkan konsep hidup sehat kepada masyarakat bumiputra serta memperluas lahan untuk perkampungan bumiputra yang semrawut dan kumuh (*Een En Ander Over Het Werk van Den Gemeenteraad van Semarang*). Usulan Tillema tersebut kurang lebih sama dengan keinginan Thomas Kasten, karenanya pemerintah akhirnya membentuk

sebuah unit kerja khusus untuk pembangunan perkampungan bumiputra yang diserahkan kepada Thomas. Program kerja ini disebut kampoongverbetering (Colombijn et al., 2014; Cote, 2011). Selain hal tersebut, pemerintah juga mulai membenahi bagian-bagian lain, salah satunya kebersihan dan lingkungan kota, serta memberikan edukasi kepada masyarakat bumiputra melalui penyuluhan dan pengajaran di sekolah.

Pembentukan Dinas Kebersihan

Pembentukan Dinas Kebersihan tidak lepas dari peranan beberapa masyarakat Eropa yang memberikan perhatian lebih kepada lingkungan di kota tempat mereka tinggal, khususnya masalah kebersihan. Sebelum resmi dibentuk, Dinas Kebersihan melakukan uji coba selama dua tahun dengan nama Divisi Kebersihan. Hasil yang diperoleh cukup memuaskan, terbukti kebanyakan masyarakat Eropa merasa terbantu dengan adanya divisi pengelolaan sampah. Oleh karenanya, rancangan pembentukan Dinas Kebersihan mulai diseriusi di tahun 1916, mulai dari struktur pegawainya, sistem dan tata kerjanya, serta pembagian wilayahnya (Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1916).

Dinas Kebersihan yang dibentuk akan berada di bawah Direktur Pekerjaan Kota, hal ini dimaksudkan supaya konsep dan tujuan Dinas Kebersihan bukan semata-mata mengelola sampah, melainkan juga memiliki visi untuk memajukan Kota Semarang menjadi kota modern, salah satu tujuan terpenting dari Burgerlijke Openbare Werken (Dinas Pekerjaan Umum) (Gemeente Semarang, 1931). Saat itu Direktur Pekerjaan Kota sedang dijabat oleh Ir. Auguste Plate, seorang arsitek lulusan Delft yang berpandangan modern. Ketika lowongan untuk Kepala Dinas Kebersihan dibuka pada tanggal 19 Oktober 1916, diantara pelamar lain, pilihan Plate jatuh kepada J.S. Wolff yang sebelumnya juga bertugas sebagai inspektur Divisi Kebersihan saat masa percobaan (Gemeente Semarang, 1931). Wolff dilantik pada bulan Maret 1917, sistem dan konsep yang sebelumnya telah disusun mulai dikaji ulang oleh Wolff. Wolff tahu apa yang diinginkan masyarakat Eropa, dia juga memahami kondisi dan struktur Kota Semarang yang berbeda dari kota-kota besar lainnya, oleh karenanya perlu ada sistem dan tata kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan Semarang dan para penghuninya (Westerveld, 1910).

Setelahnya personil Dinas Kebersihan mulai dirancang, berikut formasinya: Direktur Pekerjaan Kota, Insinyur, Arsitek, Kepala Dinas Kebersihan, Pengawas, Asisten Pengawas, Tukang Baja, Supervisor, dan Koordinator Lapangan. Susunan ini dirancang berdasarkan kebutuhan Dinas Kebersihan dan tujuan yang ingin diraih, yaitu membangun Kota Semarang menjadi lebih modern melalui peningkatan moral dengan meninggalkan kebiasaan lama yang dianggap tidak cukup baik (Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1918). Hampir seluruh personil Dinas Kebersihan berasal dari kalangan Eropa, akan tetapi yang turun secara langsung di lapangan, atau yang bertugas mengambil serta mengumpulkan sampah biasanya terdiri dari masyarakat bumiputra. Pekerja lapangan ini disebut dengan panggilan koeli atau kuli. Kuli-kuli yang bekerja di Dinas Kebersihan diberikan tempat tinggal, bahkan sempat diberi makan dua kali dalam sehari, namun bagian yang terakhir hanya berlangsung selama beberapa bulan sebab sistem pembagian makan yang tidak kondusif dan efisien (Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1918).

Pembagian Bidang Kerja

Formasi personil Dinas Kebersihan terlihat cukup sederhana, karena pembagiannya berdasarkan kebutuhan pada masa itu, utamanya dalam hal pembagian bidang kerja yang ada di Dinas Kebersihan. Bidang kerja di Dinas Kebersihan dibagi menjadi 4, yaitu:

a. Bidang I (Bidang Penyapu Jalan)

Sesuai namanya, bidang ini bertugas untuk membersihkan jalan-jalan di Kota Semarang, khususnya jalan raya umum yang biasa dilalui oleh orang-orang. Tugasnya tidak hanya menyapu, melainkan juga mengikis lumut-lumut yang ada di pinggir jalan, yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan menyapu. Timnya terdiri dari 5 orang dimana tiga diantaranya bertugas sebagai penyapu jalan, satu orang bertugas mengikis sampah dari jalan, dan yang satu bertugas mengumpulkan sampah ke gerobak lalu dibawa ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). TPA pada masa itu merupakan rawa-rawa yang ditimbun dengan tanah dan sampah supaya tidak dijadikan tempat tinggal oleh nyamuk malaria. Salah satu dari kelima orang ini bertugas sebagai kepala kuli

atau penanggung jawab dari tim tersebut, sehingga apabila ada masalah kepala kuli bisa melaporkannya kepada Koordinator Lapangan (Verslag van de Toestand der Gemeente Semarang 1914-1930).

Tim penyapu jalan merupakan tim yang paling krusial dalam Dinas Kebersihan sebab jalanan di Kota Semarang harus selalu bersih dan rapi. Karenanya, tim penyapu jalan dibagi menjadi beberapa shift, tapi khusus untuk jalan raya yang besar dan ramai (sering menjadi lalu lalang kendaraan), pembersihan hanya dilakukan di pagi atau sore hari supaya pekerjaan menyapu jalan tidak mengganggu para pengguna jalan. Tim penyapu jalan juga bekerja sama dengan bidang lainnya, yaitu bidang penyiraman. Disebabkan jalanan Kota Semarang yang berdebu, maka untuk mengantisipasi debu-debu beterbangan dibutuhkan tim penyiram jalan yang berada di Bidang IV. Akan tetapi, kerja sama tim ini pun membutuhkan keutuhan yang solid sebab jarak waktu setelah jalan disiram oleh air dan disapu oleh tim penyapu jalan harus tepat. Jika menunggu terlalu lama, jalanan akan kembali kering dan debu kembali beterbangan, namun jika terlalu cepat tanah akan sulit disapu sebab basah. Di kemudian hari, pemerintah mengantisipasi permasalahan ini dengan membuat jalanan di Semarang menjadi beraspal (Verslag van de Toestand der Gemeente Semarang 1918).

b. Bidang II (Bidang Pengumpulan Sampah Rumah Tangga, Tempat Sampah, dan Sampah Kandang)

Bidang II berfokus pada lingkungan Eropa, khususnya perumahan-perumahan elit yang ditinggali oleh warga Eropa. Tugas para kuli yang bekerja di bidang ini lebih mudah, sampah-sampah yang telah dikumpulkan oleh penghuni rumah diletakkan di halaman depan supaya para kuli tinggal mengangkutnya ke dalam gerobak. Bidang II tidak difasilitasi gerobak tangan seperti Bidang I, gerobak yang ada di Bidang II merupakan gerobak berkuda yang dikendalikan oleh seorang kusir dibantu seorang kuli. Setiap tim hanya terdiri dari dua orang, namun dirasa cukup sebab tugas bidang ini lebih santai (Verslag van de Toestand der Gemeente Semarang 1920).

Setelah urusan sampah di perumahan Eropa selesai, tim dari bidang ini mulai mengosongkan tong-tong sampah yang ada di pinggir jalan. Tong sampah ini biasanya berisi sampah dari tim Bidang I, tim Bidang II hanya bertugas untuk mengangkutnya. Sampah-sampah tersebut dituang dari tempat sampah kecil di pinggir jalan ke dalam gerobak berkuda untuk selanjutnya dibawa ke TPA (Verslag van de Toestand der Gemeente Semarang 1919). Tugas tim Bidang II yang terkesan mudah, hanya mengambil sampah dari pemukiman Eropa dan tong sampah di jalan raya, membuat tim ini diberikan tanggung jawab lain. Tanggung jawab Bidang II berikutnya adalah sampah kandang. Pembersihan sampah kandang ini jauh lebih berat sebab dibutuhkan tenaga ekstra untuk mengangkut kotoran dari kandang hewan ke dalam gerobak. Fasilitas yang digunakan awalnya hanya gerobak berkuda, dengan gerobak bervolume lebih besar dan ditarik oleh dua ekor kuda, namun seiring berjalannya waktu, gerobak berkuda ini diganti dengan truk kontainer yang bisa mengangkut sampah kandang cukup banyak.

c. Bidang III (Bidang Pembersihan Kampung-Kampung)

Bidang ini khusus bertugas mengumpulkan sampah rumah tangga dari kampung-kampung bumiputra. Alasan dibentuknya bidang khusus dan terpisah dari lingkungan Eropa karena kondisi lingkungan bumiputra yang tidak dapat dimasuki oleh gerobak berkuda, selain itu masyarakat bumiputra belum memiliki kesadaran atau kebiasaan untuk mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga dan meletakkannya di depan rumah. Oleh karenanya, sebuah tong sampah besar diletakkan di depan gerbang pemukiman orang-orang bumiputra. Masyarakat bumiputra diharuskan membuang sampah ke dalam tempat sampah ini yang nantinya akan diangkut oleh Bidang III menuju ke TPA (Verslag van de Toestand der Gemeente Semarang 1918).

Dibanding kedua bidang sebelumnya, tim dari bidang ini mengalami masalah yang lebih sukar. Hal ini dikarenakan permasalahan bukan hanya dari masalah operasional atau alat-alat dalam bekerja, melainkan juga sikap dari masyarakat bumiputra yang membuat tim Bidang III kewalahan sendiri. Beberapa sikap masyarakat bumiputra antara lain tidak memasukkan sampah ke dalam tong yang telah disediakan. Sampah-sampah tersebut dibiarkan tercecer di sekitar tempat sampah, bahkan sebagian tersebar tidak menentu di sekitar tong. Kuat dugaan sampah-sampah tersebut dilempar begitu saja dari depan gang atau gerbang masuk pemukiman. Kadang kala pihak pengelola sampah juga mendapati tong sampah yang dicuri atau tidak lagi

berada di tempatnya, kali lain tong yang telah disediakan rupanya sudah dirusak entah disengaja atau tidak (Verslag van de Toestand der Gemeente Semarang 1924; Ni'mah & Anwar, 2017).

Permasalahan ini diperparah dengan fakta bahwa tidak semua masyarakat bumiputra memiliki keinginan untuk mengumpulkan sampahnya lalu berjalan ke gerbang masuk dan membuangnya ke tempat sampah. Jalan-jalan di wilayah bumiputra masih tetap kotor dan tidak terawat meski telah disediakan tempat sampah kecil di sekitar sana. Karenanya pemerintah kemudian membentuk tim kecil-kecilan, biasanya terdiri dari anak-anak dan perempuan untuk menyapu dan membersihkan jalan-jalan di wilayah bumiputra. Para petugas tambahan ini juga diharuskan membawa sampah dari tempat sampah kecil menuju ke tempat sampah di depan gerbang supaya bisa diangkut oleh tim Bidang III menuju TPA (Verslag van de Toestand der Gemeente Semarang 1925; Een En Ander Over Het Werk van Den Gemeenteraad van Semarang).

d. Bidang IV (Bidang Layanan Penyiraman)

Tugas bidang ini berkaitan erat dengan bidang pertama sebab sebelum para penyapu jalan turun ke jalan, jalanan Kota Semarang yang panas dan berdebu harus disiram dengan air terlebih dahulu supaya debu-debu tidak beterbangan saat disapu. Selain bertugas menyiram jalan, bidang ini juga bertugas untuk menyiram taman atau tanaman-tanaman yang ada di sepanjang jalan raya umum Kota Semarang. Berbeda dengan bidang-bidang sebelumnya, bidang ini tidak bekerja sepanjang tahun sebab bidang ini hanya bekerja di musim panas dan libur saat musim hujan tiba. Karena ketidakjelasan jadwal pekerjaan tersebut pula bidang ini sempat dihentikan sementara karena musim hujan dan panas yang tidak menentu. Selain itu, Bidang IV yang belum memiliki alat sendiri untuk menyiram jalan dan tanaman harus bekerja sama dengan pemadam kebakaran untuk meminjam truk air milik petugas pemadam kebersihan. Akan tetapi hal ini menimbulkan permasalahan, terutama ketika truk milik pemadam kebakaran sedang dibutuhkan baik untuk latihan maupun urgensi lainnya. Akhirnya selama beberapa waktu Bidang IV terpaksa dihentikan sementara. Bidang IV mulai beroperasi kembali setelah pemerintah berhasil membeli beberapa truk tangki air untuk menyiram jalan dan tanaman (Een En Ander Over Het Werk van Den Gemeenteraad van Semarang; (Verslag van de Toestand der Gemeente Semarang 1927).

Bumiputra Belajar Buang Sampah pada Tempat Sampah

Selain bertanggung jawab pada kebersihan lingkungan Kota Semarang, Dinas Kebersihan juga bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat bumiputra supaya memiliki gaya hidup yang sama dengan Eropa dalam menjaga lingkungannya, sebab orang-orang Eropa percaya bahwa lingkungan yang sehat akan membuat tubuh sehat. Oleh karenanya beberapa rencana untuk memperkenalkan standar kebersihan Eropa dilakukan. Dinas Kebersihan tidak sendirian dalam melaksanakan rencana ini, Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan turut berkolaborasi untuk menyebarkan ideologi hidup bersih dan sehat menurut Eropa (Bergen et al., 2019; Liem, 2004; Memori Serah Jabatan, 1977).

Langkah pertama dalam penyebaran ideologi ini dilakukan melalui sekolah. Pendidikan merupakan cara terbaik untuk mengajari seseorang, terlebih jika dilakukan sejak usia dini. Pendidikan tentang merawat diri dan menjaga lingkungan yang diajarkan di sekolah-sekolah, khususnya dimasukkan dalam kurikulum sekolah-sekolah bumiputra diharapkan bisa menanamkan kebiasaan kecil pada masyarakat, seperti mandi dengan menggunakan sabun, minum air bersih yang telah dimasak, dan yang utama adalah membuang sampah pada tempat yang telah disediakan (Memori Serah Jabatan, 1977).

Kurikulum ini khususnya ditekankan pada anak-anak sekolah dasar sehingga kebiasaan yang diajarkan bisa dipelajari dan dibiasakan sedari kecil, karena pemerintah tahu mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah, terlebih jika dipaksakan secara instan. Meski demikian, didikan tersebut tidak hanya diajarkan di sekolah-sekolah, melainkan juga ke kampung-kampung bumiputra, dalam hal ini Dinas Kebersihan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan (Bergen et al., 2019).

Pendidikan yang diajarkan di sekolah akan terasa percuma apabila tidak dipraktikkan di lingkungan tempat tinggal si anak, oleh karenanya setiap minggu beberapa petugas pemerintahan khususnya dari Dinas Kebersihan dan Dinas Kesehatan datang ke rumah-rumah warga bumiputra satu per satu, untuk memberikan penyuluhan dan mengecek keadaan lingkungan rumah apakah sudah cukup layak sesuai standar kebersihan pemerintah. Apabila belum, beberapa diarahkan untuk melakukan perbaikan, tapi hal yang sering ditekankan

adalah menjaga lingkungan tetap bersih dengan membuang sampah tempat yang telah disediakan sehingga lingkungan tidak tercemar (Ravando, 2020). Kerja keras Dinas Kebersihan dari berbagai sisi terus diperbaiki dari tahun ke tahun supaya mendapatkan hasil yang maksimal, utamanya dalam mengedukasi masyarakat supaya kebersihan kota berjalan dua arah, yakni dari pemerintah dan dari warganya juga.

Indikator Keberhasilan Dinas Kebersihan

Pengaruh Dinas Kebersihan terhadap Kota Semarang dirasakan secara meluas, tidak hanya dalam bidang lingkungan yang sudah pasti bagian dari pekerjaan Dinas Kebersihan, melainkan juga secara sosial. Hadirnya Dinas Kebersihan di tengah-tengah masyarakat Kota Semarang telah membantu kota ini berkembang menuju modern. Jalan-jalan dibersihkan, lingkungan bumiputra turut diperhatikan, pembangunan seperti jalan raya untuk mempermudah akses pengelolaan sampah juga dilakukan, perumahan-perumahan bumiputra juga turut dibangun meski tidak sebagus milik orang Eropa. Dalam hal ini, jika dilihat dari segi lingkungan, Dinas Kebersihan bisa dikatakan berhasil karena mampu menjaga lingkungan Kota Semarang tetap bersih, bahkan rawa-rawa sebagai tempat berkembangnya nyamuk pun berhasil disulap menjadi tempat yang bermanfaat, Tempat Pembuangan Akhir (Gemeente Semarang, 1931; Westerveld, 1910).

Selain menjaga lingkungan, tugas tambahan Dinas Kebersihan adalah mengajari masyarakat bumiputra untuk hidup sesuai standar pemerintah yang berkiblat pada gaya hidup Eropa. Beberapa hal dilakukan untuk mendukung tujuan ini, seperti memasukkan pendidikan kebersihan dan kesehatan ke dalam kurikulum, atau melakukan penyuluhan ke kampung-kampung. Ajaran ini terus dilakukan selama bertahun-tahun, setiap murid sekolah dasar diajari cara merawat diri dan lingkungan, namun mengubah pola kebiasaan masyarakat bukanlah hal yang mudah sebab meski telah bertahun-tahun Dinas Kebersihan hadir di tengah masyarakat Kota Semarang, masyarakat bumiputra kalangan bawah masih dipandang sebagai masyarakat yang jorok dan kotor. Sebagian masyarakat mengerti harus membuang sampah pada tempat sampah, tapi masih banyak yang memilih untuk membuang sampah dimana saja dan meludah sembarangan. Pikirnya, ada pegawai dari Dinas Kebersihan yang bertugas membereskan sampah-sampah tersebut. Kebiasaan ini masih bisa dilihat hingga sekarang, masih banyak warga Kota Semarang yang membuang sampah sembarangan meski telah disediakan tempat sampah di tempat umum. Kinerja Dinas Kebersihan dalam mengedukasi masyarakat bumiputra dirasa kurang berhasil sebab masyarakat bumiputra masih mempertahankan kebiasaan lama yang dirasa tidak mencerminkan gaya hidup sehat dan higienis seperti yang diinginkan pemerintah.

Simpulan

Kehadiran Dinas Kebersihan sebagai perwujudan dari keinginan pemerintah dalam membangun Semarang menjadi kota modern merupakan langkah yang tepat. Semarang berhasil menjadi kota yang cukup penting di abad ke-20, kota industri yang cukup maju, tapi majunya sebuah kota tidak lepas dari masalah-masalah yang menyertai, salah satunya masalah sampah. Adanya Dinas Kebersihan di masa Semarang menjadi kotapraja sangat membantu, terutama karena berhasil menjaga lingkungan tetap bersih dan terawat. Kesadaran bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat diikutsertakan, khususnya masyarakat bumiputra. Pendidikan dan penyuluhan diberikan supaya masyarakat kelas tiga ini dapat membantu pemerintah untuk menjaga lingkungannya sendiri, sayangnya keinginan pemerintah untuk mengubah kebiasaan masyarakat bumiputra sulit dicapai karena sebagian diantaranya masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Meskipun demikian, intervensi pemerintah dalam bidang ini berhasil membuat masyarakat bumiputra mengenal konsep dan standar kebersihan menurut orang-orang Eropa.

Referensi

Arsip

Arsip Nasional Republik Indonesia. *Memori Serah Jabatan 1921-1930 Jawa Tengah*. Jakarta: Arsip Nasional Indonesia, 1977.

Departement der Burgerlijke Openbare Werken. Mededeelingen en Rapporten. *Het Rioleringsvraagstuk in Nederlandsch-Indie (Afdeling G. Werken in het Belang van de Gezondheid)*. 1920.

N. V. Dagblad de Locomotief. *Gedenkboek der Gemeente Semarang 1906-1931*. Semarang: De Locomotief.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1914.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1915.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1916.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1917.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1918.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1919.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1920.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1921.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1922.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1923.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1924.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1925.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1926.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1927.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1928.

Verslag van den Toestand der Gemeente Semarang over 1929.

Verslag van den Toestand der Staadsgemeente Semarang over 1930.

Westerveld, D. J. A. *Een en Ander over Het Werk van den Gemeenteraad van Semarang*. De Semarangsche Kiesvereniging, 1910.

Buku dan Artikel

Alatas, S. H. (1989). *Mitos Peribumi Malas*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia.

Ashadi. (2017). *Tentang Jawa*. Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Basundoro, P. (2020). *Pengantar Sejarah Kota*. Ombak.

Bergen, L. van, Hesselink, L., & Verhave, J. P. (Eds.). (2019). *Gelanggang Riset Kedokteran di Bumi Indonesia: Jurnal Kedokteran Hindia-Belanda 1852-1942*. AIPI.

Budiman, A. (2021). *Sejarah Semarang* (Rukardi (Ed.)). Sinar Hidoep.

Colombijn, F., Cote, J., & Dkk. (2014). *Cars, Couduits, and Kampongs. The Modernization of Indonesian City, 1920-1960*.

Cote, J. (2011). *Menjadikan Kampung Modern: Kampung dan Perencanaan Kolonial di Semarang 1910-1925*. In *Kampung Perkotaan, Kajian Historis-Antropologis atas Kesenjangan Sosial dan Ruang Kota*. Elmatara.

Daliman, A. (2018). *Metode Penelitian Sejarah* (3rd ed.). Ombak.

Geertz, C. (2013). *Agama Jawa (Abangan, Santri, Priyayi, dalam Kebudayaan Jawa)*. Komunitas Bambu.

Gemeente Semarang. (1931). *Gedenkboek der Gemeente Semarang 1906-1931*. De Locomotief.

Kuntowijoyo, P. D. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.

Langlois, C. V., & Seignobos, C. (2015). *Introduction to the Study of History* (1st ed.). Indoliterasi.

Liem, T. J. (2004). *Riwayat Semarang*. Hasta Wahana.

Memori Serah Jabatan. (1977).

- Moertono, S. (2017). *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ni'mah, N. L., & Anwar, I. R. M. (2017). *Reinigingsdienst: Tata Kelola Sampah Dan Fungsinya Di Kota Surabaya Tahun 1916-1940*. *Verleden*, 11.
- Nieuwenhuys, R. (2019). *Mitos dari Lebak : Telaah Kritis Peran Revolusioner Multatuli*. Komunitas Bambu.
- Notosusanto, N. (1964). *Hakekat Sejarah dan Metode Sejarah*. Jakarta: Mega Bookstore.
- Ravando. (2020). *Perang Melawan Influenza : Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial, 1918-1919*. Kompas.
- Tillema, H. F. (1916). *Kromoblanda*.
- Tim Departemen Sejarah Universitas Diponegoro, Yuliati, M.A., P. D. D., Susilowari, M.A., D. E., & Dra. Titiek Suliyati, M. T. (2020). *Riwayat Kota Lama dan Keunggulannya sebagai Warisan Dunia* (Rukardi (Ed.); 1st ed.). Sinar Hidoep.
- Van Niel, R. (2009). *Munculnya elit modern Indonesia*. Dunia Pustaka Jaya.
- Wegenraad, L. van Den, & Koreman, A. H. . (1927). *Reiniging van Wegen (Publicatie van de Nederlandsh-Indische Wegenvereniging) no. 49*. Nfx.
- Westerveld, D. J. . (1910). *Een en Ander over Het Werk van den Gemeenteraad van Semarang*. De Semarangsche Kiesvereniging.
- Wijono, R. S. (2005). *Pemukiman Rakyat di Semarang Abad XX: Ada Kampung Ramah Anak*. In *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Ombak.